

BAB 3

Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

3.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua merupakan salah satu unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Pada awalnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, yang kala itu bernama Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir II, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-162/KMK.01/1997 tanggal 10 April 1997. Unit kerja ini merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Type A Jakarta Gambir. Wilayah kerjanya ketika itu meliputi 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Gambir Kota Madya Jakarta Pusat yaitu (1) Kelurahan Cideng, (2) Kelurahan Petojo Selatan, dan (3) Kelurahan Duri Pulo.

Pada tahun 2001, unit kerja ini mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua seiring dengan adanya reorganisasi di tubuh DJP melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-443/KMK.01/2001 tanggal 21 Juli 2001. Wilayah kerjanya pun dipersempit, yaitu hanya meliputi dua kelurahan Cideng Petojo dan Selatan. Kelurahan Duri Pulo dialihkan ke dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga yang baru didirikan.

Di penghujung tahun 2004, kantor pajak ini melaksanakan reformasi administrasi yang dikenal sebagai program modernisasi administrasi perpajakan. Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-254/KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-172/PJ./2004 tanggal 29 November 2004, dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua yang menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM). Pembentukan administrasi perpajakan pratama ini merupakan yang pertama di Indonesia dan ditandai dengan perubahan struktur organisasi, prosedur kerja, penempatan sumber daya manusia dan aplikasi sistem informasi yang baru.

3.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Sebagai unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Gambir Dua juga ikut mengemban visi, misi, dan tujuan dari DJP. Visi DJP adalah membentuk pelayanan yang menjadi model pelayanan masyarakat dengan menerapkan sistem dan manajemen perpajakan yang berkelas dunia, dapat dipercaya, dan dibanggakan masyarakat. Visi ini merupakan gambaran mengenai keadaan masa depan DJP yang ingin ditransformasikan menjadi tindakan nyata melalui komitmen dan tindakan segenap jajaran DJP. Usaha untuk menjadikan DJP sebagai model pelayanan masyarakat menggambarkan cita-cita untuk menjadi panutan dan memberikan contoh pelayanan masyarakat yang baik bagi instansi pemerintah lainnya dalam melayani masyarakat. Pelayanan dengan sistem dan manajemen perpajakan yang berkelas dunia menggambarkan cita-cita DJP untuk mencapai tingkat pelayanan standar dunia atau standar internasional baik untuk kualitas pelayanan, aparat maupun kinerja dan hasil-hasilnya. Visi agar DJP dipercaya dan dibanggakan masyarakat, merefleksikan cita-cita DJP untuk

mendapat pengakuan dari masyarakat mengenai eksistensi dan kinerjanya yang berkualitas tinggi, akurat dan mampu memenuhi harapan serta memiliki citra yang baik dan bersih.

Direktorat Jenderal Pajak mengemban misi menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Misi utama tersebut kemudian diturunkan ke dalam misi fiskal, misi ekonomi, misi politik, dan misi kelembagaan. Misi fiskal adalah menghimpun penerimaan pajak guna menunjang kemandirian pemerintah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan undang-undang perpajakan sehingga diharapkan ketergantungan pemerintah pada bantuan luar negeri dapat dikurangi. Berkaitan dengan misi fiskal tersebut, DJP memiliki fungsi sebagai instrumen pembangunan dan pemulihan ekonomi. Sementara misi ekonomi DJP adalah ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang dapat meminimalkan distorsi. Misi politik adalah mendukung proses demokratisasi melalui proses otonomi daerah. Sedangkan misi kelembagaan meliputi peningkatan kemampuan DJP dalam beradaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan luar baik domestik maupun internasional. Dalam hal ini, DJP senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta perkembangan administrasi perpajakan mutakhir.

Reformasi administrasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan mencapai misi yang telah digariskan. Berhubungan dengan reformasi administrasi perpajakan tersebut, DJP memiliki 3 (tiga) tujuan spesifik yang hendak dicapai yaitu: (1) tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, (2) kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan (3) produktivitas aparat pajak yang tinggi.

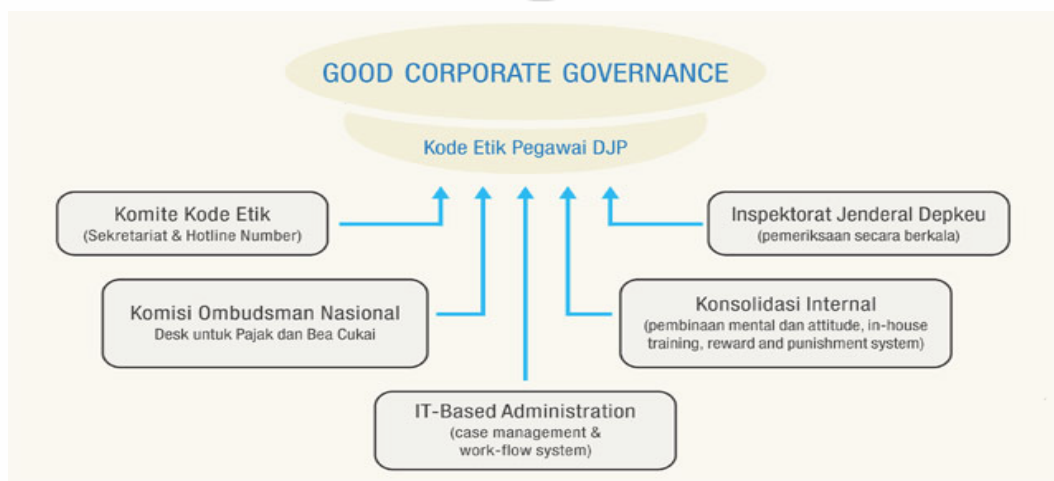
Kepatuhan pajak yang tinggi merupakan tujuan utama dari reformasi administrasi perpajakan. DJP telah menyusun 3 (tiga) strategi untuk merealisasi kepatuhan wajib pajak.

Strategi pertama adalah melalui program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, khususnya wajib pajak yang belum patuh. Kedua, melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan. Strategi ketiga adalah peningkatan kepatuhan melalui kegiatan memerangi ketidakpatuhan (*non compliance*)

Terkait dengan pencapaian tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, DJP memiliki 2 (dua) strategi yaitu peningkatan citra dan pengembangan administrasi perpajakan percontohan. Sementara untuk meningkatkan produktifitas aparat perpajakan, DJP menempuh strategi perbaikan struktur organisasi, perbaikan kemampuan pengawasan, serta perbaikan manajemen sumber daya manusia.

Penerapan *good governance* pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua (lihat Gambar 3.1) didukung dengan adanya kode etik pegawai DJP. Penerapan kode etik pegawai tersebut diawasi oleh Komite Kode Etik, Komisi Ombudsman Nasional, dan pemeriksaan berkala dari tim khusus Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, serta didukung konsolidasi internal dan *IT-based administration*.

Gambar 3.1. Good Corporate Governance DJP

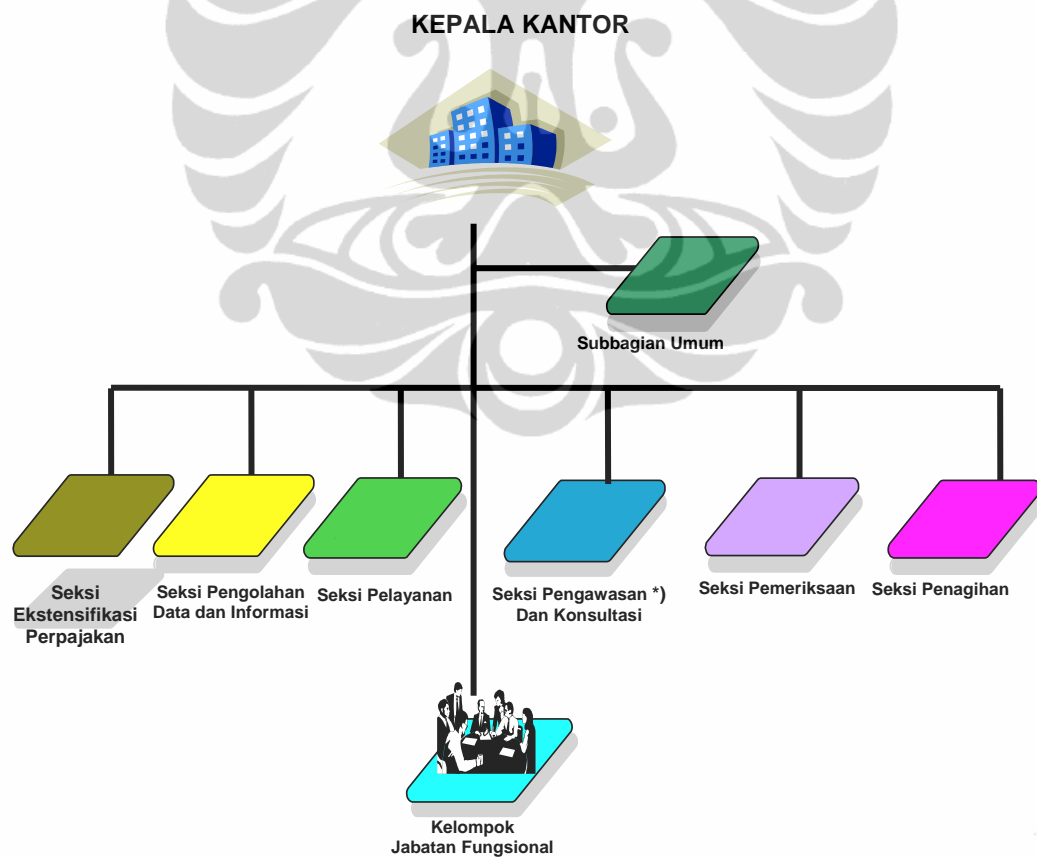


Sumber: Buku Kode Etik Pegawai DJP

3.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-254/KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004 dan Keputusan Direkur Jenderal Pajak Nomor : KEP-172/PJ./2004. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua ditetapkan sebagai kantor pajak yang pertama menerapkan sistem administrasi perpajakan modern pratama di Indonesia. Sebagai unit kerja pelopor, struktur organisasi kantor pajak ini seperti yang terlihat pada gambar 3.1, telah menjadi prototipe bagi kantor pajak lainnya yang hendak menerapkan administrasi perpajakan modern pratama.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Gambir Dua



*) Ada 4 (empat) Seksi Pengawasan & Konsultasi

Sumber: Subbag. Umum KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

Seperti dapat dilihat pada gambar 3.1, secara garis besar bagian-bagian dari struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

Fungsi kepala kantor dijalankan oleh seorang pejabat setingkat eselon III yang bertugas memimpin organisasi dan bertanggung jawab atas kinerja kantor secara keseluruhan

b. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas dan wewenang pelayanan kesekretariatan, pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan kantor dan keuangan kantor.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi ini dipimpin oleh seorang pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas dan wewenang dalam pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi perpajakan, *entry-data* perpajakan (perekaman dokumen) pengalokasian PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, penyajian laporan kerja dan urusan tata usaha penerimaan pajak.

d. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak dan kerja sama perpajakan.

e. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas urusan penata usaha piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan pajak.

f. Seksi Penerimaan

Seksi Penerimaan dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan umum.

g. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas pelaksanaan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan.

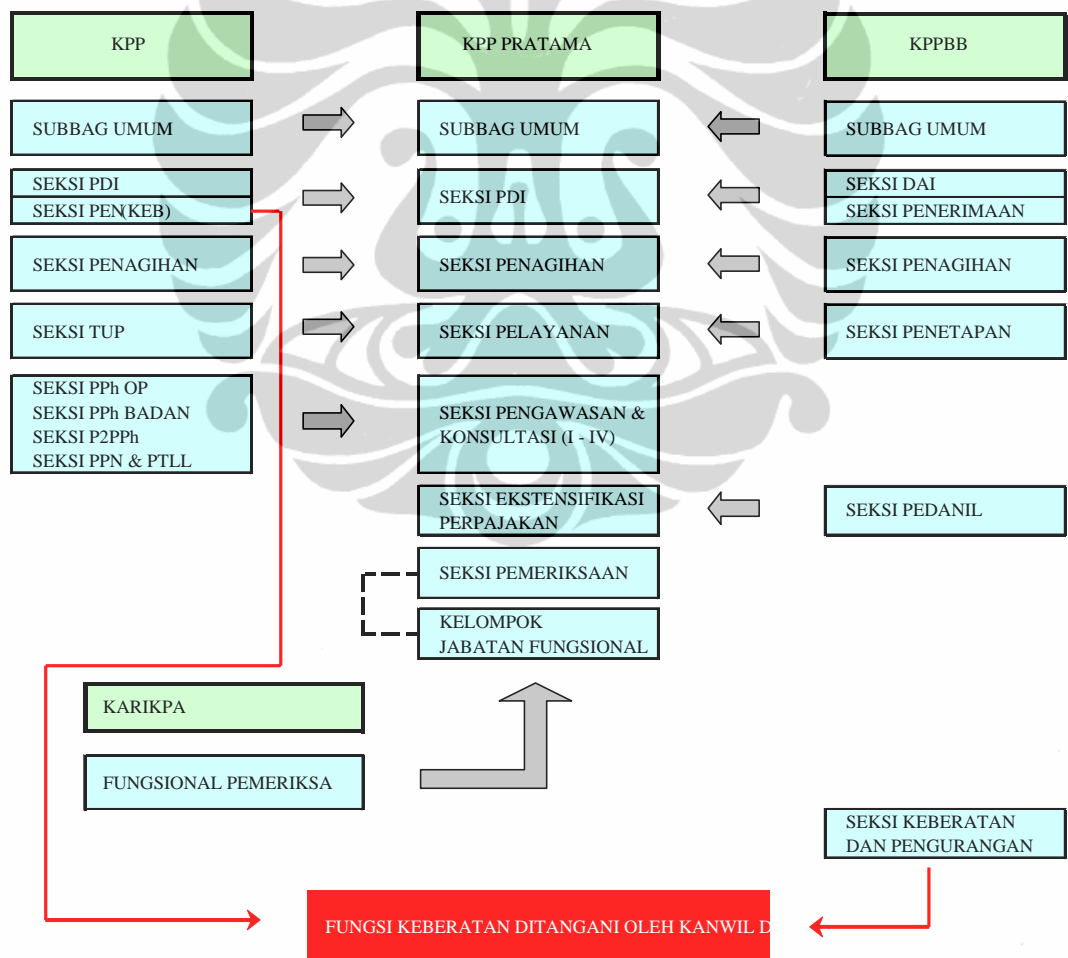
h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I s.d IV)

Terdiri dari 4 (empat) seksi yaitu Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV. Masing-masing seksi dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding. Pelaksanaan tugas di seksi ini didukung *Account Representative* yaitu pegawai yang khusus memberikan pelayanan, pengawasan dan konsultasi kepada wajib pajak yang terdapat di wilayah kerjanya masing-masing yang sebelumnya telah ditentukan.

i. Kelompok Pejabat Fungsional

Terdiri dari kelompok pejabat pemeriksa pajak dan fungsional penilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pejabat fungsional pemeriksa pajak memiliki tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan pajak. Pejabat fungsional penilai bertugas melakukan pendataan dan penilaian obyek PBB.

Gambar 3.3 Bagan Peleburan KPP Belum Pratama, KPPBB dan Karikpa menjadi struktur organisasi KPP Pratama



Sumber: Subbag. Umum KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

Pada dasarnya, struktur organisasi pada administrasi perpajakan modern pratama merupakan gabungan dari tiga struktur kantor pajak yang belum pratama (non modern) yaitu struktur organisasi kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan struktur organisasi kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak. Seperti ditunjukkan dalam gambar 3.2 Struktur organisasi KPP Pratama menampung fungsi-fungsi yang sebelumnya terdapat pada 3 (tiga) unit kerja tersebut. Peleburan dari tiga kantor pajak ini berimbas pada semakin berat dan luasnya fungsi, tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh kantor pajak pratama.

3.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki KPP Pratama Jakarta Gambir Dua seperti yang terlihat pada tabel 3.1, sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan sarjana atau setingkat sarjana S1 dan DIV), yaitu sebanyak 57 Orang atau sekitar 49,56% dari total pegawai. Pegawai berpendidikan DI dan DIII menyusul dengan komposisi masing-masing sebesar 13,91%. Dari perspektif jabatan, pegawai yang berperan sebagai *account representative* paling banyak, yaitu 40 orang dan pelaksana 40 orang dan pejabat fungsional sebanyak 25 orang.

Tabel 3.1 Sumber Daya Manusia KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

Jabatan & Pangkat	Pendidikan						Total
	SLTA	DI	DIII	DIV	SI	S2	
Kepala Kantor					1		1
Kepala Seksi					2	7	9
Fungsional	2		5		14	4	25
AR	13		2	4	19	2	40
Pelaksana	11	16	9		4		40
Jumlah	26	16	16	4	40	13	115
IIA	1	10					11
IIB		3					3
IIC	3	3	10		1		17
IID	5		3		1		9
IIIA	11		2	1	20		34
IIIB	4		1	3	9	3	20
IIIC	2				8	5	15
IIID						3	3
IV A						2	2
IV B					1		1
Jumlah	26	16	16	4	40	13	115
%	22.61%	13.91%	13.91%	3.48%	34.78%	11.30%	100%

Sumber: Data kepegawaian KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

Dari perspektif kepangkatan, sebagian besar pegawai berada pada pangkat IIIA (penata muda) dengan jumlah 34 orang. Pegawai dengan pangkat IIIB dan IIC berada di urutan kedua dan ketiga dengan jumlah masing-masing 20 dan 17 orang. Data mengenai sumber daya manusia KPP Pratama Jakarta Gambir Dua selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 4.1.

3.5. Ruang Lingkup Pekerjaan

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua menangani administrasi pajak-pajak negara (pusat) baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Secara umum fungsi kantor pelayanan pajak pratama adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan dan pengolahan data, pengujian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi perpajakan;

- Penelitian dan penata usaha surat pemberitahuan tahunan dan masa serta berkas wajib pajak;
- Pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan (PPh) , pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak tidak langsung lainnya (PTLL), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- Penata usahaan penerimaan pajak dan penagihan piutang pajak;
- Pemrosesan permohonan keberatan dan peninjauan kembali, atau meneruskan ke kantor wilayah atau kantor pusat direktorat jenderal pajak, penata usahaan banding serta penyelesaian restitusi semua jenis pajak;
- Pemeriksaan pajak;
- Penerbitan surat ketetapan pajak;
- Penyuluhan dan konsultasi pajak; dan
- Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak pratama

Secara geografis, wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua meliputi dua kelurahan di kecamatan Gambir Jakarta Pusat yaitu kelurahan Cideng dan Petojo Selatan. Wilayah strategis di wilayah KPP Gambir Dua meliputi Komplek Perkantoran Majapahit Permai yang berada di Jl. Majapahit No.18-22 Jakarta Pusat, Komplek Perkantoran/Pertokoan/Apartemen di Roxy Mas yang berada di Jl.KH.Hasyim Ashari No.125 Jakarta Pusat dan Komplek Perkantoran Delta Bulding yang berada di Jl. Suryopranoto No.1-9 Jakarta Pusat. Batas-batas wilayah kerja meliputi jalan KH Hasyim Ashari di sebelah utara, jalan Jatibaru di sebelah selatan, jalan Banjir Kanal dan rel kereta api Tanah Abang di sebelah barat, dan jalan Abdul Muis, jalan Majapahit dan jalan Cideng Barat di sebelah timur.

Luas wilayah kerja melingkupi 239,98 Ha yang terdiri dari tanah kering dan bangunan dengan jumlah penduduk sebanyak ±35.247 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK)

sebanyak 9.826 orang. Sementara komposisi wajib pajak dan obyek pajak terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Cideng berjumlah 4.189 dan Kelurahan Petojo Selatan berjumlah 3.148. sedangkan Wajib Pajak Badan Kelurahan Cideng berjumlah 4.985 Wajib Pajak Kelurahan Petojo Selatan berjumlah 5.842 Wajib Pajak. serta 8.458 obyek pajak bumi dan bangunan.

